



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 28861

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/212 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 333.000.000

1. MOBIL, VW BEETLE MINIBUS Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, VW GOLF MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.970.500.000

III. HUTANG Rp. 775.147.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.195.353.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.